|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabael/ Aspek** | **Indikator** | **Hubungan Kausal** | **Dampak/ Akibat** |
| Latar belakang | Kenaikan tunjangan DPR memunculkan polemik karena dianggap tidak transparan, tidak adil, dan minim akuntabilitas. Mahasiswa sebagai agen kritis menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip good governance dan berpotensi menurunkan legitimasi DPR. | Membangkitkan perhatian mahasiswa dan publik terhadap kinerja DPR. Respon negatif,lahirnya kritik terhadap DPR. | Pandamgan negatiif mahasiswa, lahirnya kritik terhadap DPR |
| Peraturan | UUD 1945 Pasal 20 & 23 (fungsi legislasi dan anggaran DPR) - UU No. 17 Tahun 2014 (MD3) - UU No. 25 Tahun 2009 (Pelayanan Publik: transparansi, akuntabilitas) - PP tentang Hak Keuangan & Administratif DPR | Peraturan ini menjadi dalam kenaikan tunjangan DPR | Menimbulkan perdebatan publik terkait keadilan regulasi. |
| Kebijakan Kenaikan Tunjangan DPR (X) | Besaran tunjangan kurang transparan (FITRA, 2025), tidak adil (Nugroho, 2025; Zulkafli, 2025), minim akuntabilitas (Tulung, 2025). | Dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa Universitas Lampung | Persepsi mahasiswa menjadi buruk dan kritis terhadap DPR |
| Faktor yang mempengaruhi | Internal DPR: kesejahteraan anggota , legitimasi politik . - Eksternal: kondisi ekonomi nasional, prioritas anggaran , tekanan publik, - Mahasiswa: akses informasi, literasi politik, peran organisasi , media pembingkaian berita, viralnnya isu. | Faktor-faktor ini memperkuatat atau melemahkan pengaruh kebijakan DPR terhadap persepsi mahasiswa. | Terjadinya peningkatan kritik atau dukungan terhadap DPR |
| Pandangan Mahasiswa UNILA (Y) | Transparansi, keadilan, akuntabilitas, empati sosial, efesiensi anggaran. | Membentuk penilaian kritis mahasiswa UNILA terhadap DPR. | Legistimasi DPR menurun, resistensi sosial meningkat, DPR dianggap gagal menerapkan good governance |
| Lokus Penelitian | Universitas Lampung (UNILA). Mahasiswa dipilih karena aktif dalam gerakan sosial-politik, memiliki kapasitas akademik, serta berpotensi membentuk opini publik di Lampung. | Lokus penelitian menentukan konteks sosial dan politik persepsi mahasiswa | Memberikan Gambaran empiris representasi opini publik mahasiswa di daerah |
| Teori yang Digunakan | Teori Legitimasi (Suchman, 1995). Teori Good Governance, Teori Persepsi Sosial. Teori Demokrasi Partisipatoris. | Teori menjadi landasan dalam membaca hubungan X (kebijakan) → Y (pandangan mahasiswa) → Implikasi. | Menghasilkan analisis akademis dan kerangka konseptual penelitian. |
| Implikasi | Penurunan legitimasi DPR, melemahnya kepercayaan publik, kegagalan prinsip good governance | Mengancam demokrasi dan peran DPR. | Krisis legitimasi DPR. |
| Kondisi Ideal | Kebijakan DPR dibuat transparan, akuntabel, adil, partisipatif. Mahasiswa punya akses informasi terbuka sehingga kritik bersifat konstruktif. Legitimasi DPR tetap terjaga. Prinsip good governance tercermin dalam kebijakan anggaran negara. | Menciptakan hubungan sehat antara DPR, mahasiswa, dan publik. | Menciptakan hubungan sehat antara DPR, mahasiswa, dan publik. |

Pemikiran penelitian ini didasari oleh fenomena kenaikan tunjangan DPR yang selama ini menimbulkan kontroversi di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Kebijakan ini dipandang bermasalah karena kurangnya transparansi, ketidakadilan, dan rendahnya akuntabilitas. Situasi ini menjadi latar belakang munculnya persepsi kritis di kalangan mahasiswa terhadap DPR.

Secara hukum, dasar pemberian tunjangan DPR terdapat dalam Pasal 20 dan 23 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta peraturan pemerintah mengenai hak keuangan DPR.

Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini dinilai tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Faktor-faktor yang memengaruhi munculnya persepsi mahasiswa dapat dilihat dari sisi internal dan eksternal.

Secara internal, mencakup kesejahteraan anggota DPR dan legitimasi politik. Secara eksternal, ini melibatkan tekanan publik, kondisi ekonomi nasional, dan prioritas anggaran. Selain itu, mahasiswa sebagai kelompok kritis dipengaruhi oleh akses terhadap informasi, literasi politik, organisasi mahasiswa, dan opini yang tersebar melalui media sosial. Media juga merupakan faktor penting karena cara berita dibingkai dapat memperkuat atau melemahkan opini mahasiswa tentang DPR.

Penelitian ini berfokus pada Universitas Lampung (UNILA). Pemilihan mahasiswa UNILA sebagai subjek penelitian didasarkan pada kedudukan mereka sebagai kelompok intelektual yang terlibat aktif dalam gerakan sosial politik lokal dan peran strategis mereka dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, persepsi mahasiswa UNILA dapat mewakili pandangan generasi muda terhadap kebijakan DPR.

Untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan DPR dan pandangan mahasiswa, penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori. Pertama, teori legitimasi (Suchman, 1995) menjelaskan bahwa kebijakan yang tidak selaras dengan nilai-nilai publik dapat mengurangi legitimasi kelembagaan. Kedua, teori tata kelola yang baik digunakan untuk mengevaluasi kebijakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Ketiga, teori persepsi sosial membantu memahami bagaimana pandangan siswa terbentuk melalui interaksi dengan informasi dan pengalaman. Keempat, teori demokrasi partisipatif menekankan peran mahasiswa sebagai agen kontrol sosial atas kebijakan negara.

Secara konseptual, peningkatan tunjangan DPR (X) memengaruhi pandangan kritis mahasiswa UNILA (Y) terhadap DPR. Persepsi inilah yang kemudian berujung pada merosotnya legitimasi DPR, meningkatnya resistensi masyarakat, dan munculnya anggapan bahwa DPR telah gagal menegakkan asas-asas pemerintahan yang baik.

Dalam jangka panjang, implikasi-implikasi ini berpotensi menimbulkan krisis legitimasi bagi DPR, yang dapat mengancam demokrasi. Namun, kondisi yang diinginkan atau ideal adalah kebijakan-kebijakan DPR yang transparan, akuntabel, adil, dan partisipatif.

Dengan demikian, kritik mahasiswa akan bersifat membangun, legitimasi DPR tetap terjaga, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dapat terwujud dalam penyelenggaraan negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arifin, Z. (2022). Literasi Politik Mahasiswa dalam Dinamika Demokrasi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dwipayana, A. (2018). Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial Politik di Indonesia. Yogyakarta: LKiS.

FITRA. (2025). Laporan Evaluasi Anggaran Negara dan Tunjangan DPR. Jakarta: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran.

Hidayat, R. (2023). Politik Anggaran dan Legitimasi DPR. Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia, 29(1), 45–60.

Kementerian PANRB. (2022). Laporan Penyelenggaraan Good Governance di Indonesia. Jakarta: KemenPANRB.

Nugroho, D. (2025). Analisis Ekonomi Politik atas Kebijakan Tunjangan DPR. Jurnal Ekonomi Politik Indonesia, 8(1), 12–25.

Puskapol UI. (2024). Opini Publik tentang DPR: Hasil Survei Nasional. Jakarta: Universitas Indonesia.

Suryadi, A. (2021). Aktivisme Mahasiswa di Lampung: Kritik dan Gerakan Kolektif. Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia, 25(1), 88–102.

Tulung, J. (2025). Akuntabilitas DPR dalam Pengelolaan Anggaran Negara. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 15(2), 134–149.

Zulkafli, H. (2025). Transparansi dan Evaluasi Kebijakan Anggaran DPR. Jurnal Hukum & Politik Indonesia, 10(1), 55–70.